

Efisiensi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Penulis:

Harry Wiryatama
Arma¹⁾
Khairul²⁾

Afiliasi:

Magister Manajemen
Institut Teknologi dan
Bisnis Haji Agus Salim
Bukittinggi^{1,2)}

Korespondensi:

harrywiryatama13@gm
ail.com

Histori Naskah:

Submit: 30-07-2023
Accepted: 02-08-2023
Published: 08-08-2023

Penelitian dilatarbelakangi oleh perencanaan anggaran pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dimana para perencanaan SKPD dalam menyusun RKA tidak menentukan skala prioritas yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *purposive sampling* kemudian di analisis menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai sudah efisien yang mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, namun ada problematika yaitu terjadinya pemborosan biaya dari ATK dan terdapatnya SILPA (siswa lebih anggaran). Efisiensi penyerapan anggaran dari segi pelaksanaan sudah teralisasi dari segi program yang ada pada tahun 2018-2022 sudah tercapai. Laporan realisasi anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018-2022 yang terdiri dari dua program yaitu belanja operasional dan belanja modal sudah cukup baik. Namun terjadi penurunan realisasi anggaran pada tahun 2022 hanya 95,52 % belanja operasional dan 87,53% belanja modal.

Kata kunci: efisiensi, Penyerapan Anggaran, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pendahuluan

Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Termasuk Unit Pelayanan Teknis di masing-masing Dinas. Dalam pembuatan rencana keuangan tahunan atau anggaran memerlukan beberapa aspek penting yaitu perencanaan anggaran yang matang, kualitas sumber daya manusia tercukupi dan berkompeten, serta pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan yang direncanakan (Zarinah & Darwanis, 2016).

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang telah disetujui untuk dibelanjakan (Anwar, *et al*, 2022). Tingkat penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sering menjadi topik utama dibahas oleh para pengamat ekonomi sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan target penyerapan anggaran memang

berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (Putri, 2019).

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan jajarannya. Dengan adanya pengukuran efisiensi suatu instansi dapat menilai apakah suatu program telah tercapai dengan pendanaan yang serendah-rendahnya. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi ini digunakan untuk memepertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Efisiensi artinya menggunakan sumber daya yang minimal menghasilkan output yang maksimal yang merupakan perbandingan antara input dan output. Meiriki, Musharianto, & NS, (2020) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisinesi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhannya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan siklus pengelolaan keuangan daerah, dalam menggunakan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai dengan perencanaan anggaran dan diakhiri dengan pelaporan serta pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Begitu juga penelitian Fahrianta, & Carolina, (2016) menyatakan bahwa dari efisiensi secara keseluruhan dinas pendidikan Kabupaten Kapuas telah efisien dalam menggunakan anggaran belanja atau dengan kata lain tidak ada realisasi anggaran belanja melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang ada pada sistem perencanaan anggaran pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dimana para perencanaan SKPD dalam menyusun RKA tidak menentukan skala prioritas yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran atau anggaran kas pada setiap triwulannya. Adanya permasalahan pada sistem perencanaan diakibatkan karena pelaksanaan yang kurang optimal. Dari pantauan dilapangan oleh peneliti, pada pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dirasakan masih belum optimal. Adanya kinerja keuangan daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena

keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi pembengkakan kinerja keuangan pada akhir tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efisiensi penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Mendeskripsikan faktor penyebab kurangnya efisiensi penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Studi Literatur

Teori Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan Publik (*Public Policy*) oleh Nugroho, (2021). Yang mana teori ini merupakan seperangkat konsep atau konstruksi, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sebagai hasil penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metode penulisan ilmiah tertentu untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati/diteliti. Teori yang dipaparkan dalam kajian teori ini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan pada bab sebelumnya dan sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.

Menurut Nugroho, (2021) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen penting dalam laju perkembangan suatu negara, sebagai respon dan intervensi dari masalah publik dan sebagai upaya pemerintah untuk manajemen kehidupan bersama. Nugroho, (2021) mengemukakan bahwa semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang membedakan adalah bagaimana respon pemerintah terhadap masalah tersebut, respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Kemampuan para aktor pemangku kebijakan untuk mengembangkan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang unggul akan menentukan keunggulan suatu negara baik saat ini maupun di masa depan.

Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara kegiatan dengan hasil yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas usahanya efisiensi dapat dijadikan sebagai parameter kinerja suatu lembaga ataupun organisasi. Di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga (Prasetyo & Nugrahen, 2020). Efisiensi adalah kata yang menyatakan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankannya dan diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan atau input dan keluaran atau output. Daud & Mus, (2022) menjelaskan bahwa efisiensi juga dapat diartikan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Dalam hal ini masukan dapat meliputi bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Meskipun dalam menentukan efisiensi mempunyai unsur-unsur berbagai macam, namun penghematan pada nilai efisiensi juga dapat diartikan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk perbandingan antara masukan terhadap keluaran.

Dalam hal ini masukan dapat meliputi bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Meskipun dalam menentukan efisiensi mempunyai unsur-unsur berbagai macam, namun penghematan pada nilai.

Konsep Anggaran

Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Mukmin, (2017) menjelaskan bahwa Organisasi publik tentunya ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakatnya, tetapi tidak jarang bahwa organisasi publik mendapatkan hambatan yang umumnya dikarenakan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki. Mayasari, *et al*, (2021) menyatakan bahwa anggaran merupakan sebuah proses dalam mengalokasikan sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan oleh Organisasi Publik. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut Efriandi, Kurnia, Putra, & Syukria, (2022). Sedangkan menurut Boy, & Siringoringo, (2011) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode.

Anggaran Sektor Publik

Menurut Huler, (2016) menyatakan bahwa anggaran sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada bawahannya atau instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik anggaran menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja. Anggaran juga berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pasal 1 Ayat 9) tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Metode Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada Mei-Juli 2023. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis Miles dan Hiberman (dalam Moleong, 2012) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam teknik analisisnya berupa:



1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian perlu dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah direduksi maka akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti membuat uraian singkat sesuai dengan kategori dan keterkaitan antar kategori dan juga mengenai uraian dari rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang *valid* dan konsisten maka saat peneliti kembali kelapangan dengan mengumpulkan data dan kemudian ditarik kesimpulan yang dikemukakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Efisiensi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Tepat Kebijakan

Penyusunan anggaran dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berlandaskan azas efisiensi dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders. Wawancara yang dilakukan dengan KDK Kabupaten Lima Puluh Kota 12 Juni 2023 menyatakan bahwa pada tabel berikut:

Tabel 1. hasil wawancara dengan KDK Kabupaten Lima Puluh Kota

Informan	Pertanyaan	Jawaban	Tema
KDK Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan apa yang dimaksud dengan efisiensi?	“efisiensi sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran dinas. Dengan tingkat efisiensi yang baik, itu berarti bahwa program-program dijalankan sesuai budget awal. Efisiensi merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah	Program dijalankan sesuai dengan budget

		yang berusaha untuk mencapai kriteria efisien dalam penyerapan anggaran. Namun untuk mencapai kriteria tersebut bukan hal yang mudah. Isntansi pemerintah harus merealisasikan budget yang telah ditetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik, maka kriteria efektif dan efisien tidak akan tercapai”.	
--	--	---	--

Sumber: Hasil wawancara dilapangan, 2023

Berdasarkan data wawancara di atas, bahwa analisis data efisiensi yang baik Secara agregat, memiliki 1 tema yaitu program dijalankan sesuai dengan budget. Realisasi penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan realisasi penyerapan anggaran semakin cepat dan tinggi di waktu akhir tahun anggaran, terutama di triwulan terakhir, terlebih lagi di bulan Desember. Pola tersebut terjadi setiap tahun dan belum ada perubahan yang berarti.

Identifikasi terhadap pola penyerapan anggaran yang ideal juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran. Apakah pola yang memang terjadi saat ini sudah merupakan pola ideal ataupun ada pola penyerapan lain yang lebih ideal namun belum dapat dicapai pada saat ini sehingga diperlukan berbagai langkah dan kebijakan dalam rangka mencapai pola penyerapan ideal tersebut. Wawancara didukung oleh BMD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 Juni 2023 menyatakan bahwa pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Wawancara BMD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Informan	Pertanyaan	Jawaban	Tema
BMD Kabupaten Lima Puluh Kota	2. Bisakah Bapak/Ibuk ceritakan apa yang dimaksud Penyerapan anggaran?	“Penyerapan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu perencanaan untuk pembangunan. Meskipun program pembangunan direncanakan dengan sangat baik, tanpa realisasi anggaran tentu saja	Penyederhanaan, prosedur, penerbitan DIPA lebih awal

		pembangunan tersebut tidak akan terjadi. Penyerapan anggaran masih menjadi masalah klasik yang sulit untuk dipecahkan. Setiap tahun anggaran, rendahnya realisasi dan penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun selalu berulang. Berbagai langkah sudah dilakukan seperti penyederhanaan prosedur, penerbitan DIPA lebih awal, dan berbagai langkah lain sudah dilakukan, namun permasalahan tersebut masih terus terjadi”.	
--	--	--	--

Sumber: Hasil wawancara dilapangan, 2023

Berdasarkan analisis data dari wawancara di atas, bahwa menghasilkan 4 tema yaitu, penyederhanaan prosedur, penerbitan DIPA lebih awal, dan berbagai langkah lain sudah dilakukan, namun permasalahan tersebut masih terus terjadi. Anggaran juga digunakan untuk menjalankan roda pembangunan pada dinas untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Namun sudah menjadi persoalan umum bahwa sebagian besar pemerintahan daerah tidak dapat memanfaatkan anggaran atau APBD yang dimiliki setiap tahun secara maksimal. Permasalahan lain yang terjadi adalah meskipun pada akhirnya anggaran dapat direalisasikan, namun sebagian besar masih menumpuk di akhir tahun. Menumpuknya anggaran di akhir tahun merupakan salah satu indikasi kurang efektif dan efisien nya pengeluaran publik di daerah. Hal ini bias disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, proses administrasi yang lamban, proses lelang dan prosedur hukum yang harus ditempuh dan berbagai kemungkinan penyebab lainnya.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan tentang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan di daerah, dengan adanya otonomi daerah maka pengelolaan diharapkan daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam peningkatan efisiensi penyerapan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien tersebut maka pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi prioritas utama setiap pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin dan membangun daerahnya. Sektor keuangan sangat krusial dan menjadi masalah yang sangat sensitif, sehingga akuntabilitas pengelolaan perlu menjadi prioritas manajemen

keuangan daerah, dimana pimpinan daerah mesti memiliki prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang jelas.

b. Tepat Pelaksananya

Efiseinsi penyerapan anggaran dari segi tepat pelaksanaan pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan prinsip dari suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya. Pelaksanaan harus dilakukan sesuai aturan pemerintah. Walaupun sasaran anggaran sudah dibuat dengan jelas, kesalahan pada tiap individu itu sendiri tidak dapat terhindarkan, disebabkan karena individu tersebut tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Ketidakpemilikan informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Namuan kenyataanyan dari segi pelaksanaan penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lima puluh kota sudah tepat dari segi pelaksanaan program yang ada. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang pasti, kondisi inilah yang akan membuat individu untuk melakukan penyusunan anggaran dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejelasan tujuan anggaran akan mempengaruhi peningkatan senjangan anggaran. Dapat dilihat dalam data table di bawah ini:

Tabel. 3 Kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Capaian %
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	20.088.000	20.025.000	63.000	99,69
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran	900.000	894.000	6.000	99,33
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.326.000	2.326.000	-	100
Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Aset Dinas Pendidikan	1.065.294.930	1.010.550.000	54.744.930	94,826
Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan	75.119.000	55.830.000	19.289.000	74,32
Total	1.163.727.930	1.089.625.000	74.102.930	93,63

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2022.

Berdasarkan data tabel diatas bahwa efisiensi penyerapan anggaran dari segi pelaksanaan sudah tepat teralisasi dari segi program yang ada pada tahun 2022. Yang mana capaian pelaksanaan program yang ada sudah mencapai target. Namun dari segi program realisasi anggaran berbeda-beda. Dina pendidikan dan kebudayaan Kabuapten Lima Puluh Kota penyerapan anggaran yang cukup tinggi dengan tingkat penyerapan penyusunan ananggaran sebesar 99,69%, penyerapan pelaporan anggaran sebesar 99,33%. Reaalisasi penyerapan keunagan akhir tahun 100%, pelaporan asset dinas, 94, 82%, dan namun terjadi penurunan kegiatan penyusunan dan kegiatan anggaran hanya 74,32 % terlaksana. Namuan secara keseluruhan sudah baik.

C. Tepat Target

Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dana yang diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan berbagai kegiatan program serta meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan aspirasi masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhannya yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berdasarkan siklus pengelolaan keuangan daerah, dalam menggunakan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai dengan perencanaan anggaran dan diakhiri dengan pelaporan serta pertanggungjawaban.

Pada saat wawancara yang dilakukan kepada KSB Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 13 Juni 2012 berpendapat berpendapat:

Tabel 4. Hasil wawancara KSB Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Informan	Pertanyaan	Jawaban	Tema
KSB Kabupaten Lima Puluh Kota	3. Bisakah Bapak/Ibu target dalam penyerapan anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota?	"tepat target sangat diperlukan untuk penyerapan anggaran segi operasional dan belanja modal dalam menentukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka penyerapan anggaran juga akan tercapai maksimal apabila strategi yang dibangun sudah jelas berisi target, sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh kota	Belanja operasional dan belanja modal..

Sumber: Hasil wawancara dilapangan, 2023

Berdasarkan data wawancara di atas, bahwa dari analysis data peneliti ditemukan 2 tema yaitu belanja operasional dan belanja modal. Pada saat wawancara SKP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan bahwa :

Tabel 5. Hasil wawancara wawancara SKP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Informan	Pertanyaan	Jawaban	Tema
SKP Kabupaten Lima Puluh Kota	4. Bisakah Bapak/Ibuk target dalam penyerapan anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota?	Kejelasan target untuk pencapaian tujuan terkait dengan rencana, impian, tujuan organisasi perangkat daerah Disdikbud sebagai OPD pelayan publik perlu target dalam penentuan kebijakan di masa yang akan datang. Kejelasan strategi ini berpengaruh terhadap efisiensi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota."	Rencana, impian, tujuan organisasi

Sumber: Hasil wawancara dilapangan, 2023

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa dari analysis data ditemukan 3 tema yaitu rencana, impian, tujuan organisasi. Pada saat wawancara yang sama dengan SKP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 13 Juni 2023 berpendapat:

Tabel 6. Hasil wawancara wawancara SKP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Informan	Pertanyaan	Jawaban	Tema
SKP Kabupaten Lima Puluh Kota	5. Bisakah Bapak/Ibuk target dalam penyerapan anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota?	Kejelasan target pencapaian tujuan berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan diturunkan Renstra Provinsi dan diturunkan ke Renstra Kabupaten sesuai RPJMD maka dokumen Renstra OPD berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota."	Rencana, impian, tujuan organisasi

Sumber: Hasil wawancara dilapangan, 2023

Sesuai basil wawancara dengan SKP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis melanjutkan wawancara dengan KD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 13 Juni 2023 berpendapat:

Tabel 6. Hasil wawancara wawancara SKP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota

Informan	Pertanyaan	Jawaban	Tema
KD Kabupaten Lima Puluh Kota	6. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan tujuan dari target yang ingin dicapai dalam penyerapan anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota?	"Tujuan yang jelas, jika terkait dengan target yang akan hendak dicapai dari belnja operasional dan belanja modal berarti berhubungan dengan dokumen perencanaan Rencana Strategis OPD yang berisi tentang estimasi dan target untuk masa periode tertentu, target yang hendak dicapai berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota. Karena tujuan dapat menentukan arah kemana akan dibawa agar jelas capaiannya."	Rencana, impian, tujuan organisasi

Sumber: Hasil wawancara dilapangan, 2023

Berdasarkan keseluruhan wawancara dan dokumentasi di atas. Dari analisis penulis menghasilkan 5 tema yaitu rencana, impian, tujuan organisasi, belanja operasional dan belanja modal. Dapat diketahui bahwa efisiensi penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dari segi tepat target dari segi program belanja operasional dan belanja modal sudah tercapat dengan baik. Hal ini dikarenakan strategi sangat diperlukan untuk penyerapan anggaran dalam menentukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, maka penyerapan anggaran juga akan tercapai maksimal apabila strategi yang dibangun sudah jelas berisi target, sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini akan di analisis sebagai berikut:

1. Efisiensi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Tepat Kebijakan

Penyusunan anggaran dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berlandaskan azas efisiensi dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders. Didukung dengan penelitian Efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut Mahmudi (2013) menjelaskan bahwa efisiensi adalah terkait hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Identifikasi terhadap pola penyerapan yang ideal juga perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran. Apakah pola yang memang terjadi saat ini sudah merupakan pola ideal ataupun ada pola penyerapan lain yang lebih ideal namun belum dapat dicapai pada saat ini sehingga diperlukan berbagai langkah dan kebijakan dalam rangka mencapai pola penyerapan ideal tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 telah menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang terdiri dari gambaran mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi anggaran selama tahun atau periode tertentu. Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan efisiensi penyerapan anggaran berpedoman pada peraturan. Kemudian tepat pelaksanaan, digunakan sebagai indikator efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan aktor kebijakan yang tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3)".

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan tentang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan di daerah, dengan adanya otonomi daerah maka pengelolaan diharapkan daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam peningkatan efisiensi penyerapan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien tersebut maka pengelolaan keuangan daerah perlu menjadi prioritas utama setiap pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin dan membangun daerahnya. Sektor keuangan sangat krusial dan menjadi masalah yang sangat sensitif, sehingga akuntabilitas pengelolaan perlu menjadi prioritas manajemen keuangan daerah, dimana pimpinan daerah mesti memiliki prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang jelas.

Artinya dalam penyerapan anggaran pada sektor pendidikan dinilai sudah efisien yang mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan kebijakan tentang berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan di daerah, dengan adanya otonomi daerah maka pengelolaan diharapkan daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam peningkatan efisiensi penyerapan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Tepat Pelaksananya

Efisiensi penyerapan anggaran dari segi tepat pelaksanaan pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan prinsip dari suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan harus dilakukan sesuai aturan pemerintah. Walaupun sasaran anggaran sudah dibuat dengan jelas, kesalahan pada tiap individu itu sendiri tidak dapat dihindarkan, disebabkan karena individu tersebut tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Ketidakefisienan informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

Namun kenyataannya dari segi pelaksanaan penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lima puluh kota sudah tepat dari segi pelaksanaan program yang ada. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang pasti, kondisi inilah yang akan membuat individu untuk melakukan penyusunan anggaran dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejelasan tujuan anggaran akan mempengaruhi peningkatan efisiensi anggaran.

Efisiensi penyerapan anggaran dari segi pelaksanaan sudah tepat teralisasi dari segi program yang ada pada tahun 2018-2022. Yang mana capaian pelaksanaan program yang ada sudah mencapai target. Namun dari segi program realisasi anggaran berbeda-beda. Pada pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota penyerapan anggaran yang cukup tinggi dengan tingkat penyerapan penyusunan anggaran sebesar 99,69%, penyerapan pelaporan anggaran sebesar 99,33%. Realisasi penyerapan keuangan akhir tahun 100%, pelaporan aset dinas, 94, 82%, dan namun terjadi penurunan kegiatan penyusunan dan kegiatan anggaran hanya 74,32 % terlaksana. Namun secara keseluruhan sudah baik.

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi diatas. Dapat diketahui bahwa kenyataan dari segi pelaksanaan penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tepat dari segi pelaksanaan program yang ada. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang pasti, kondisi inilah yang akan membuat individu untuk melakukan penyusunan anggaran dengan baik. Namun dari setiap program ada terdapat sisa anggaran sehingga dapat dilihat bahwa tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Tepat Target

Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dana yang diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan berbagai kegiatan program serta meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan aspirasi masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah salah satunya ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa laporan realisasi anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018-2022 yang terdiri dari dua program yaitu belanja operasional dan belanja modal sudah cukup baik. Namun terjadi penurunan realisasi anggaran pada tahun 2022 hanya 95,52 % belanja operasional dan 87,53% belanja modal.

Efisiensi penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dari segi tepat target dari segi program belanja operasional dan belanja modal sudah tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan strategi sangat diperlukan untuk penyerapan anggaran dalam menentukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka penyerapan anggaran juga akan tercapai maksimal apabila strategi yang dibangun sudah jelas berisi target, sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penelitian Efisiensi penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota disimpulkan bahwa Tepat Kebijakan. Penyerapan anggaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai sudah efisien yang mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, namun ada problematika yaitu terjadinya pemborosan biaya dari ATK dan terdapatnya SILPA (sisa lebih anggaran). Kemudian Tepat Pelaksanaannya. Efisiensi penyerapan anggaran dari segi pelaksanaan sudah teralisasi dari segi program yang ada pada tahun 2018-2022 sudah tercapai. Terakhir Tepat Target. Laporan realisasi anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018-2022 yang terdiri dari dua program yaitu belanja operasional dan belanja modal sudah cukup baik. Namun terjadi penurunan realisasi anggaran pada tahun 2022 hanya 95,52 % belanja operasional dan 87,53% belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., Yuniarsih, Y., Depeda, A. P., Tambunan, E. C., & Rosa, T. (2022). Penggunaan Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Dalam Perusahaan. *Joel: Journal Of Educational And Language Research*, 1(8), 1083-1096.
- Anfujatin, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 14(01).
- Arizona, A. N. D., & Juliana, J. (2022). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Studi Kasus Lldikti Wilayah I Sumut. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 190-198.
- Daud, N., & Mus, C. P. (2022). Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)(Studi Kasus Kualitas Belanja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu). *Poros Ekonomi*, 1(1).
- Meiriki, A., Musharianto, A., & Ns, N. L. (2020). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Musamus Journal Of Public Administration*, 3(1), 10-19.
- Murdani, M., & Suherlan, A. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2).
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, Ed Iv.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015–2019. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1-10.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 29-36.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1).
- Rahayu, S. P. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Tahun 2019 (Studi Kasus: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman). *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi*.
- Rahmayanti, A. (2019). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Bpka) Kota Bandung* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Sains, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Wahyuningsih, Y. E. (2022). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 350-359.
- Zarinah, M., & Darwanis, S. A. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(1).